

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Sejarah Berdirinya Instansi

Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perjalanan Kearsipan Jawa Tengah dimulai dari sebuah gudang tempat perbekalan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di kawasan Tambaksari. Lokasi tersebut berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sebagai gudang yang di dalamnya tersimpan mobil, sepeda motor, dan juga mesin penggiling gabah terpaksa harus menjadi tempat penyimpanan arsip, dikarenakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai gudang penyimpanan arsip yang representatif.

Bangunan Gudang tersebut merupakan gudang tua yang telah dimakan usia dengan halaman yang ditumbuhi rumput-rumput dan beberapa bangkai mobil sebagai pelengkap ornamen klasik. Bangunan tanpa plafon, panas, dan pengap serta sesekali dikunjungi rob air laut. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah berupaya untuk segera menangani arsip-arsip yang menumpuk tersebut dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/134/1980 tanggal 16 Juni 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut bekerja sama dengan ANRI dalam survei arsip sehingga diketahui jumlah arsip yang ada, yaitu 2250 meter lari (satuan ukuran volume arsip) arsip inaktif yang berada di gudang tersebut.

Menyingkapi hal tersebut maka dilakukan penyuluhan pengelolaan arsip inaktif di Lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Jawa Tengah.

Dikhawatirkan arsip-arsip tersebut terkena banjir rob kemudian dipindahkan di gedung di jalan Rinjani no. 7 Semarang. Sebenarnya gedung di jalan Rinjani tidak lebih luas dari tempat penyimpanan di Tambaksari yang hanya bisa menampung sekitar 1416 meter lari, namun di gedung Rinjani suasananya lebih mendukung untuk keselamatan arsip karena tempatnya nyaman, jauh dari keramaian dan kesibukan kota, dan udaranya masih sejuk, sebelum memperoleh lokasi yang tepat untuk membangun depo arsip. Dalam penyimpanan dan perawatan arsip perlu di pertimbangkan tempat dan lingkungan bangunan tersebut, berdasarkan berbagai syarat yang dimaksud diatas pilihan jatuh di daerah Sronдол dan kebetulan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masih memiliki lahan yang cukup luas di daerah tersebut.

Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki standar tempat penyimpanan arsip, yaitu lokasi perkantoran jauh dari pusat keramaian kota, jauh dari pusat industri, terletak di dataran yang lebih tinggi serta bebas banjir, bangunan terbuat dari bahan yang tahan api, dan tercukupinya kebutuhan ventilasi udara sehingga kelembapan udara tetap terjaga.

Pembangunan fisik depo sebagai pusat arsip daerah dimulai pada tahun anggaran 1980 / 1981 dan selesai pada tanggal 15 Juni 1982. Satu anugrah bisa diresmikan pemakaian Gedung Depo oleh Gubernur Soeparjo Rustam pada tanggal 2 April 1983. Pada prinsipnya pusat arsip daerah Provinsi Jawa Tengah telah terbentuk sejak 1980, tetapi belum bisa belum bisa merealisasi kegiatannya. Ada beberapa hal yang belum memenuhi syarat, diantaranya masih terbatasnya SDM yang terampil di bidang kearsipan, kurangnya sarana dan prasarana, serta masih minimnya dana. Kemudian pada tahun 1987 pusat arsip daerah Provinsi Jawa Tengah dapat merealisasikan kegiatannya karena ada beberapa faktor pendorong, yaitu:

1. Volume arsip di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah semakin banyak.
2. Kegiatan pembinaan arsip di daerah telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat.
3. Telah tersedianya SDM yang terampil di bidang kearsipan.
4. Telah dimulainya pembangunan gedung sebagai depo arsip daerah Provinsi Jawa Tengah.

Seiring berjalannya waktu, kinerja pegawai arsip daerah yang penuh semangat menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah sehingga beliau berusaha menjadikan lembaga struktural yaitu kantor arsip daerah tingkat I Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan Mendagri No. 061.1/2464/SJ tanggal 10 Juni 1988, Perihal Persetujuan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagai UPD dan Keputusan Mendagri Nomor 15 tahun 1988 tanggal 30 Maret 1988 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Perubahan lembaga kearsipan dari non struktural menjadi lembaga struktural adalah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Gebrakan yang dilakukan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tonggak sejarah bagi dunia kearsipan di Indonesia pada umumnya, karena Jawa Tengah menjadi pelopor pembentukan Kantor Arsip Daerah seluruh provinsi di Indonesia.

Kantor Arsip Daerah sebelumnya bernama Pusat Arsip Daerah Tk I Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan, Keputusan Gubernur KDH TK I Jawa Tengah Nomor 061/134/1980 tanggal 16 Juni 1980. Selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4/1993 tanggal 27 April 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Dati I Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok membina dan mengelola kearsipan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah khususnya arsip dinamis.

Kantor Arsip Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai Keputusan Kepala ANRI Nomor OT 00/390/36/1994 mempunyai tugas pokok mengelola arsip statis. Badan Arsip Daerah dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2011, merupakan gabungan eks Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Arsip Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Penggabungan tersebut juga berakibat pada penggabungan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang merupakan gabungan dua instansi yaitu Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Logo Instansi

Gambar 2.1

Logo Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah



Logo suatu perusahaan merupakan simbol yang mencerminkan perusahaan tersebut. Logo pun merupakan bagian atau identitas

perusahaan, identitas tersebut merupakan suatu hal yang memungkinkan perusahaan dapat dikenal dan memiliki perbedaan dengan perusahaan lain.

1. Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan filsafah Negara yakni Pancasila.
2. Laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.
3. Candi Borobudur melambangkan daya cipta yang besar tradisi yang baik dan nilai-nilai kebudayaan yang khas dari rakyat Jawa Tengah
4. Gunung Kembar mempunyai arti bersatunya rakyat dan Pemerintah Daerah.
5. Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya yang hijau menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan bermacam-macam kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan penghidupan Rakyat Jawa Tengah.
6. Bambu Runcing melambangkan Kepahlawanan dan Kelestarian Rakyat Jawa Tengah.
7. Bintang bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga “Nur Cahaya” melambangkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa dari rakyat Jawa Tengah.
8. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran rakyat Jawa Tengah.
9. Umbul-Umbul Merah Putih melambangkan daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perpaduan antara Bintang, Padi dan Kapas melambangkan hari depan rakyat Jawa Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
11. Perpaduan antara Bulir Padi yang berbiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan angka-angka yang mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat “17 Agustus 1945” yang wajib kita agungkan.

2.3. Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Instansi

Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki visi, misi, motto serta maklumat pelayanan sebagai berikut:

2.3.1. Visi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan berdaya saing.

2.3.2. Misi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan Perpustakaan.
2. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

2.3.3. Motto Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Pelayanan yang tepat guna adalah tujuan kami (The right service is our goal).

2.3.4. Maklumat Pelayanan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini kami menyatakan apartur Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sanggup:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan waktu untuk menampung, menangani keluhan dan menjamin ketersediaan informasi untuk pelanggan/pengguna/user.

2.4. Tugas dan Fungsi Instansi

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kearsipan dan perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan.
- c. Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, akuisisi dan pengolahan, pelestarian dan preservasi, layanan dan pemasyarakatan serta pengembangan dan hubungan antar lembaga lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5. Program Kerja Instansi

Program Non Urusan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Program Urusan Kearsipan:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
3. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Program Perpustakaan:

1. Program Pengembangan Budaya Baca.
2. Program Pengembangan Peningkatan SDM Perpustakaan.
3. Program Pengembangan Sarpras Perpustakaan.
4. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan.

2.6. Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi adalah kerangka hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Maka, struktur organisasi diperlukan oleh suatu perusahaan agar dapat menjalankan organisasi dengan baik. Struktur organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dibawah ini: